



RANCANGAN AKHIR
RENJA
PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN **2024**

DINAS PERHUBUNGAN



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan di sektor Perhubungan yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha, sehingga rencana pembangunan di sektor Perhubungan perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal diharapkan dapat terwujud pemerataan pembangunan disektor perhubungan di seluruh Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 072 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, bertugas membantu Gubernur Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Perhubungan yang telah menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan mengacu kepada Misi dan Visi Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021-2026.

Secara umum Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan

2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2021-2026.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



M.FITRI HERNADI, AP, M.si

NIK 19751102 199412 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan RENJA SKPD Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan SKPD, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan.

Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah 2021 – 2026 yaitu : **“Kalsel Mapan (Maju dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”**

1.2 Landasan Hukum

A. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 berdasarkan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
19. Peraturan Gubernur Nomor 072 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;

B. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Tugas Pokok

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;

- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengordinasikan kegiatan Lalu Lintas Jalan;
- d. Memutuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mangordinasikan kegiatan Pelayaran;
- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengordinasikan kegiatan Angkutan Jalan;
- f. Membina, mengawasi dan mangendalikan unit pelaksana teknis;
- g. Membina dan mangendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2. Fungsi Instansi

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan Lalu Lintas Jalan;

- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan Pelayaran;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan Angkutan Jalan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada periode tahun 2024.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan Perhubungan yang telah ditetapkan tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan apa sajakah urusan yang diketota oleh Perangkat Daerah dan apakah afti penting dari tiap urusan tersebut dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bila tidak

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang semua perundang-undangan yang terkait secara langsung dan mengatur tentang SOTK tugas pokok dan fungsi, kewenangan perangkat daerahserta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah yaitu peningkatan kinerja penyelenggaraan

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, oleh karena itu bab ini melaksanakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya kajian tersebut di kaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA perangkat daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktorfaktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Pelaksanaan capaian kinerja Tahun 2022 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik , hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja Program dari 3 program sebesar 100 % (berhasil), penyerapan anggaran tahun 2022 untuk belanja sebesar 93,94 % (berhasil) sebagaimana disajikan

dalam tabel 2.1 tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2022. Namun demikian ada beberapa hal terkait tupoksi Dinas Perhubungan yang masih perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan kinerja antara lain peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) , pelayanan publik, akurasi data base serta kelengkapan sarana dan prasarana sektor perhubungan. Analisis teknis untuk penyusunan rencana kerja tahun 2024 dapat dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan tahun 2022 dan pencapaian RENSTRA Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2023 (perkiraan) yang disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

			K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)																						
X.XX.01.1.08.04	Jumlah Bangunan Kantor yang dibersihkan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12	bulan	665.059.800	3	bulan	137.124.016	6	bulan	317.605.232	9	bulan	475.460.838	12	bulan	658.043.854	100	98.95	12	bulan	658.043.854	100	98.95																			
	Jumlah Makanan Minuman Pegawai Selama Tahun					12	bulan	0	3	bulan		6	bulan		9	bulan		12	bulan		100		12	bulan		100																				
	Jumlah Makanan Minuman Rapat					12	bulan	0	3	bulan		6	bulan		9	bulan		12	bulan		100		12	bulan		100																				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				100	85.28																									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST	T																									
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100	%	2.590.963.850	25	%	187.196.278	50	%	531.371.038	75	%	873.300.268	100	%	2.581.085.517	100	99.62	100	%	2.581.085.517	100	99.62																			
X.XX.01.1.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12	bulan	837.030.000	3	bulan	123.722.971	6	bulan	416.393.954	9	bulan	675.731.565	12	bulan	835.545.117	100	99.82	12	bulan	835.545.117	100	99.82																			
	Jumlah Pajak-Pajak Kendaraan Dinas yang Terbayarkan					12	bulan	0	3	bulan		6	bulan		9	bulan		12	bulan		100		12	bulan		100																				
X.XX.01.1.09.10	Jumlah Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12	bulan	1.753.933.850	3	bulan	63.473.307	6	bulan	114.977.084	9	bulan	197.568.703	12	bulan	1.745.540.400	100	99.52	12	bulan	1.745.540.400	100	99.52																			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				100	99.67																									
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST	ST																									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				100	94.75																									
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	ST																									
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	One Time Performance Layanan Transportasi (Darat)					29.25	%	24.100.725.700	11	%	6.349.651.865	37.75	%	16.020.932.998	75.5	%	16.841.343.908	75.5	%	22.570.369.460	258.12	93.65	75.5	%	22.570.369.460	258.12	93.65																			
	Rasio Konektivitas Provinsi					0.59	%	0	0.55	%		0.68	%		0.68	%		0.68	%		115.25	0	0.68	%		115.25	0																			
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian Per 100.000 Keberangkatan					0	kejadian	0	0	kejadian		0	kejadian	3.075	kejadian		3.075	kejadian		3.075	kejadian	INF	0	3.075	kejadian	INF	0																			
2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang dengan kebutuhan perlengkapan jalan provinsi					100	%	16.675.415.400	25	%	5.693.430.484	75	%	11.429.749.725	99.38	%	11.475.216.363	100	%	16.330.508.545	100	97.93	100	%	16.330.508.545	100	97.93																			
2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Terpasang Zoss	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Terpasang Zoss					4	Titik	15.518.018.600	1	Titik	5.250.750.747	4	Titik	10.897.007.971	4	Titik	10.913.415.011	4	Titik	15.201.613.964	100	97.96	4	Titik	15.201.613.964	100	97.96																			
	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Provisi yang Terpasang Marka					12000	Meter	0	0	Meter		0	Meter	0	Meter		0	Meter		0	0	Meter		0	0	Meter	0																			

		2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					5	Ruas	53.031.900	1	Ruas	950.000	3	Ruas	20.210.000	5	Ruas	30.221.350	5	Ruas	41.075.550	5	Ruas	41.075.550	100	77.45	5	Ruas	41.075.550	100	77.45																											
		2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					13	Kab/Kota	75.527.100	4	Kab/Kota	0	9	Kab/Kota	11.426.200	13	Kab/Kota	53.989.141	13	Kab/Kota	65.169.141	13	Kab/Kota	65.169.141	100	86.29	13	Kab/Kota	65.169.141	100	86.29																											
		2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Ruas Jalan Provinsi yang diawasi dan di kendalikan efektifitas Pelaksanaan kebijakannya untuk Jalan Provinsi					13	Ruas	3.871.364.500	3	Ruas	144.364.667	6	Ruas	3.440.092.644	10	Ruas	3.627.187.090	13	Ruas	3.837.322.126	13	Ruas	3.837.322.126	100	99.12	13	Ruas	3.837.322.126	100	99.12																											
		2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi yang Teraksana					6	kali	75.334.600	1	kali	0	4	kali	21.524.000	6	kali	27.266.491	6	kali	47.435.091	6	kali	47.435.091	100	62.97	6	kali	47.435.091	100	62.97																											
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100	81.46																															
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	T																															
		2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan					100	%	75.426.900	25	%	13.456.526	50	%	18.459.876	75	%	22.318.296	100	%	45.570.996	100	%	45.570.996	100	60.42	100	%	45.570.996	100	60.42																											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Data tepat waktu sehingga selalu uptodate dalam penyajiannya																																																												
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Adanya Sub Kegiatan yang masih belum maksimal serapannya sehingga mempengaruhi untuk realisasi keuangannya																																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : melaksanakan penyelesaian SPJ dan kegiatan sesuai dengan rencana																																																												
No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021		Unit Penanggung Jawab																																				
				K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	I		II		III		IV		K	Rp (Ribuan)	K	Rp (%)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																													
		2.15.02.1.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang Diterbitkan					6	Dokumen	37.730.400	3	Dokumen	8.530.526	6	Dokumen	9.980.526	6	Dokumen	11.313.426	6	Dokumen	23.910.526	6	Dokumen	23.910.526	100	63.37	6	Dokumen	23.910.526	100	63.37																											
		2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang diawasi					10	Kali	37.696.500	2	Kali	4.926.000	4	Kali	8.479.350	7	Kali	11.004.870	100	Kali	21.660.470	100	Kali	21.660.470	1000	57.46	100	Kali	21.660.470	1000	57.46																											
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												550	60.42																															
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	R																															
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Persentase pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan llaaj di jalan					100	%	38.495.400	25	%	5.132.000	50	%	26.958.000	75	%	38.278.935	100	%	38.278.935	100	%	38.278.935	100	99.44	100	%	38.278.935	100	99.44																											

		2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						4	Kab/kota	38.495.400	1	Kab/kota	5.132.000	3	Kab/kota	26.958.000	4	Kab/kota	38.278.935	4	Kab/kota	38.278.935	4	Kab/kota	38.278.935	100	99.44	4	Kab/kota	38.278.935	100	99.44																												
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100	99.44																																
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	ST																																
		2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang tersedia					100	%	2.836.320.200	25	%	454.683.080	50	%	910.681.160	75	%	1.375.257.160	100	%	1.845.922.620	100	%	1.845.922.620	100	65.08	100	%	1.845.922.620	100	65.08																												
		2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Ketersediaan Ritase Layanan Angkutan BRT yang Beroperasi					4015	RIT	2.819.227.600	0	RIT	454.683.080	45	RIT	906.065.160	75	RIT	1.365.601.160	4015	RIT	1.831.994.220	4015	RIT	1.831.994.220	100	64.98	4015	RIT	1.831.994.220	100	64.98																												
		2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	jumlah ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi yang di awasi					420	Unit	17.092.600	96	Unit	0	190	Unit	4.616.000	298	Unit	9.656.000	420	Unit	13.928.400	420	Unit	13.928.400	100	81.48	420	Unit	13.928.400	100	81.48																												
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100	73.24																																
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	S																																
		2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase penetapan jaringan trayek di provinsi kalimantan selatan					100	%	195.808.900	25	%	5.040.000	50	%	76.600.050	75	%	76.600.050	100	%	140.821.035	100	%	140.821.035	100	71.92	100	%	140.821.035	100	71.92																												
		2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Provinsi					1	Dokumen	135.679.300	0	Dokumen	0	0	Dokumen	56.071.200	0	Dokumen	56.071.200	0	Dokumen	119.347.185	0	Dokumen	119.347.185	0	87.96	0	Dokumen	119.347.185	0	87.96																												
		2.15.02.1.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan trayek antarkota dalam provinsi					2	laporan	60.129.600	0	laporan	5.040.000	0	laporan	20.528.850	50	laporan	20.528.850	2	laporan	21.473.850	50	laporan	21.473.850	2500	35.71	50	laporan	21.473.850	2500	35.71																												
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												1250	61.84																																
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																													R																																
		2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang					100	%	123.927.800	25	%	16.297.554	50	%	32.390.670	75	%	62.138.664	100	%	100.643.476	100	%	100.643.476	100	81.21	100	%	100.643.476	100	81.21																												
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																																																													
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																																																													
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Data tepat waktu sehingga selalu uptodate dalam penyajiannya																																																													
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Adanya Sub Kegiatan yang masih belum maksimal serapannya sehingga mempengaruhi untuk realisasi keuangannya																																																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : melaksanakan penyelesaian SPJ dan kegiatan sesuai dengan rencana																																																													

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021		Unit Penanggung Jawab							
								Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		I		II		III											IV						
								K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)										K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (%)	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
		Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dalam trayek dalam provinsi																												
		2.15.02.1.13.02	Jumlah rekomendasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			4	Dokumen	123.927.800	1	Dokumen	16.297.554	2	Dokumen	32.390.670	2	Dokumen	62.138.664	4	Dokumen	100.643.476	4	Dokumen	100.643.476	100	81.21	4	Dokumen	100.643.476	100	81.21	
												Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		100	81.21																
												Predikat Kinerja Sub Kegiatan		ST	T																
		2.15.02.1.14	Persentase izin usaha angkutan taksi dalam provinsi			100	%	80.073.000	25	%	16.297.554	50	%	32.840.670	75	%	52.870.365	100	%	77.621.941	100	%	77.621.941	100	96.94	100	%	77.621.941	100	96.94	
		2.15.02.1.14.02	Jumlah rekomendasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi			12	laporan	80.073.000	5	laporan	16.297.554	6	laporan	32.840.670	9	laporan	52.870.365	12	laporan	77.621.941	12	laporan	77.621.941	100	96.94	12	laporan	77.621.941	100	96.94	
												Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		100	96.94																
												Predikat Kinerja Sub Kegiatan		ST	ST																
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100	83.86																
												Predikat Kinerja Kegiatan		ST	T																
		2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian Per 100.000 Keberangkatan			0	kejadian	2.799.032.000	0	kejadian	248.036.773	0	kejadian	905.833.475	3.075	kejadian	1.143.594.842	3.075	kejadian	2.737.200.327	3.075	kejadian	2.737.200.327	INF	97.75	3.075	kejadian	2.737.200.327	INF	97.75	
			One Time Performance Layanan Transportasi (Air)			29.25	%	0	11	%	37.75	%	75.5	%	75.5	%	75.5	%	75.5	%	258.12	0	75.5	%	258.12	0					
			Rasio Konektivitas Provinsi			0.59	%	0	0.55	%	0.68	%	0.68	%	0.68	%	0.68	%	0.68	%	115.25	0	0.68	%	115.25	0					
		2.15.03.1.02	Persentase perbitan izin usaha angkutan laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan			100	%	53.998.900	25	%	11.639.000	50	%	23.307.000	75	%	35.008.560	100	%	50.804.560	100	%	50.804.560	100	94.08	100	%	50.804.560	100	94.08	

		2.15.03.1.06.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah rekomendasi Izin Usaha Jasa Terkait AngkutanPerairan yang diterbitkan					15	Rekomendasi	71.417.300	2	Rekomendasi	23.660.000	6	Rekomendasi	34.900.000	11	Rekomendasi	35.940.625	15	Rekomendasi	67.279.925	15	Rekomendasi	67.279.925	100	94.21	15	Rekomendasi	67.279.925	100	94.21
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																																
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																																
		2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar					100	%	2.617.467.700	25	%	209.006.973	50	%	827.257.275	75	%	1.042.535.857	100	%	2.576.467.042	100	%	2.576.467.042	100	98.43	100	%	2.576.467.042	100	98.43
		2.15.03.1.10.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan danau yang memenuhi standar					2	Buah	72.766.700	0	Buah	4.263.350	1	Buah	17.497.950	2	Buah	22.796.550	2	Buah	57.590.550	2	Buah	57.590.550	100	79.14	2	Buah	57.590.550	100	79.14
			Jumlah Laporan Data Jaringan Lintas Penyeberangandi Provinsi Kalimantan Selatan					4	Buah	0	0	Buah		0	Buah		0	Buah		4	Buah		4	Buah		100		4	Buah		100	
			Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja yang tersedia					12	Buah	0	0	Buah		0	Buah		0	Buah		12	Buah		12	Buah		100		12	Buah		100	
		2.15.03.1.10.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah pengoperasian pelabuhan sungai danau yang terawasi					14	Kab/Kota	2.246.311.400	3	Kab/Kota	136.163.904	6	Kab/Kota	669.353.201	11	Kab/Kota	807.584.670	14	Kab/Kota	2.222.180.546	14	Kab/Kota	2.222.180.546	100	98.93	14	Kab/Kota	2.222.180.546	100	98.93

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Data tepat waktu sehingga selalu uptodate dalam penyajiannya

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Adanya Sub Kegiatan yang masih belum maksimal serapannya sehingga mempengaruhi untuk realisasi keuangannya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : melaksanakan penyelesaian SPJ dan kegiatan sesuai dengan rencana

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan(Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 AkhirPeriode RenstraPerangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2021		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	I		II		III		IV		K	Rp (Ribuan)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribuan)	K (%)	Rp (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
				K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribuan)	K (%)	Rp (Ribuan)	K (%)	Rp (Ribuan)	

	2.15.03.1.10.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah pengoperasian pelabuhan sungai danau yang sesuai standar				9	Buah	298.389.600	3	Buah	68.579.719	6	Buah	140.406.128	9	Buah	212.154.637	9	Buah	296.695.946	9	Buah	296.695.946	100	99.43	9	Buah	296.695.946	100	99.43																				
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan yang tersedia				4	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100		4	Laporan	100																									
			Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja yang tersedia				12	laporan	0	0	laporan	0	laporan	0	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100		12	laporan	100																									
																						Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		100	92.5																										
																						Predikat Kinerja Sub Kegiatan		ST	ST																										
																						Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100	90.67																										
																						Predikat Kinerja Kegiatan		ST																											
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program									45.170.966.118			9.900.483.145			24.502.828.731			29.671.563.972			42.435.664.896			42.435.664.896			42.435.664.896																								
																						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)		INF	95.06																										
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM....)			ST																										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Data tepat waktu sehingga selalu uptodate dalam penyajiannya																																																			
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Adanya Sub Kegiatan yang masih belum maksimal serapannya sehingga mempengaruhi untuk realisasi keuangannya																																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : melaksanakan penyelesaian SPJ dan kegiatan sesuai dengan rencana																																																			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah tertuang dalam RPJ MD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n - 2)	Tahun 2022 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)	Tahun 2021 (n - 2)	Tahun 2022 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indikator Kinerja Kunci											
1	Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang tipe B					50%						
2	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi					61						

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2021 (n - 2)	Tahun 2022 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)	Tahun 2021 (n - 2)	Tahun 2022 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	3	presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi				28%							
2.	Indikator Kinerja PD												
	1	Rasio Konektivitas Provinsi			0.57	0.59	0.61	0.63	0.5987	0.603	0.61	0.63	
	2	On time Performance Layanan Transportasi			34	58.5	58.5	59	0.166	75.5	58.5	59	
	3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100.000 Keberangkatan			2.73	2.65	2.6	1.6	0	3.075	2.6	1.6	
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi			77.5	81.3	81.5	81.7	77.5	78.9	81.5	81.7	
	5	V/C Ratio Jalan Provinsi			0.5	0.5	0.5		0.265	0.44			

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan jika dilihat Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dinas penghasil maka dapat digambarkan capaian kinerja pemenuhan Pendapatan Asli Daerah bidang perhubungan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian PAD Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	395.000.000,-	523.102.400,-	132,43
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	275.000.000,-	383.901.400,-	139,60
4.1.0202.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	275.000.000,-	383.901.400,-	139,60
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	120.000.000,-	139.201.000,-	116,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang Bus Umum	120.000.000,-	139.201.000,-	116,00

Hasil pencapaian pendapatan Dinas Perhubungan pada tahun 2022 menunjukkan angka yang positif, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 395.000.000,- yang telah direalisasikan bisa mencapai Rp. 523.102.400,- atau 132% target telah

tercapai. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian pendapatan yang baik pada Dinas Perhubungan .

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam catatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terdapat lima masalah besar yang tengah melilit sektor transportasi darat di Indonesia saat ini, yaitu:

1. Pengelolaan transportasi darat belum efisien dan efektif terutama di daerah tertinggal, terluar dan terdalam (3T);
2. Kurangnya rasa kebersamaan dalam penggunaan transportasi darat seperti egois pengemudi yang kerap terjadi di jalan raya;
3. Masih mengabaikan aspek keselamatan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas);
4. Angkutan massal yang belum merata terutama di wilayah kepulauan;
5. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi, yang di akibatkan oleh belum terintegrasinya antar sektor transportasi umum.

Sementara itu, isu-isu yang berkembang pada konteks regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi massal, konvensi bahan bakar fosil ke gas bahkan sudah mengarah ke sistem transportasi yang digerakkan dengan listrik dan memaksimalkan *inteligensia transport management* (manajemen transportasi yang cerdas) sehingga menyediakan layanan inovatif terkait moda transportasi dan manajemen lalu lintas yang berbeda.

Adapun beberapa isu yang mengemuka di bidang transportasi yang sampai dengan saat in masih aktual adalah:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi dan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut;
2. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke seamless trasport.(transportasi yang lancar);
3. Perlunya penataan transportasi perkotaan yang memiliki kondisi lingkungan udara yang sehat, peningkatan daya saing serta mendorong investasi;
4. Rendahnya penggunaan angkutan umum yang di indikasikan dengan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi;
5. Perlunya pengembangan dan pemanfaatan transportasi masal berbasis jalan dan rel sebagai alternatif pergerakan orang dan barang.
6. Perlunya peningkatan peran Terminal tipe B untuk peningkatan pelayanan umum yang efektif dan efisien sebagai pintu gerbang IKN.
7. Kurangnya disiplin masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas khususnya bagi angkutan umum dan angkutan barang.

8. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap over dimensi dan over loading, yang mengakibatkan kurangnya keselamatan berlalu lintas.
9. Masih kurangnya manajemen rekayasa lalu lintas untuk ruas jalan provinsi yang berkeselamatan.
10. Kurangnya sosialisasi terhadap ketersediaan angkutan umum.

Jika dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, secara umum bidang transportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan sungai dihadapkan pada permasalahan berupa rendahnya kualitas dan cakupan layanan. Hal ini dicirikan antara lain berupa:

1. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai;
2. Belum optimalnya proses pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
3. Kurangnya penyediaan angkutan umum massal yang efektif, efisien dan tepat waktu;
4. Belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
5. Belum optimalnya pelayanan terminal tipe B.

Permasalahan utama bidang perhubungan adalah (1) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan; (2) Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas moda transportasi, (3) Jumlah penumpang

angkutan umum yang masih rendah, (4) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan masih tingginya overloading angkutan barang, (5) Belum adanya skylift truck untuk perbaikan lampu lalu lintas, (6) kurangnya kualitas dan pelayanan yang didapat dari Terminal tipe B, (7)) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum.

Jika dilihat dari dampak tugas dan fungsi Dinas Perhubungan terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan mendukung visi dan misi Gubernur ke.3, yaitu “Memperkuat Sarana dan Prasarana Dasar Perekonomian” sedangkan dampak terhadap capain program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik bidang perhubungan dengan merencanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja VISI/MISI Gubernur maupun capaian program nasional.

Tantangan dan peluang dalam mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan bidang perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tantangan untuk mengoptimalkan pelayanan publik bidang perhubungan berbasis teknologi adalah adanya keterbatasan anggaran dan profesionalisme aparatur, sedangkan peluangnya masih adanya pemerataan dalam pendelegasian SDM dan budaya komunikasi yang luwes sehingga perencanaan per bidang saling terkait untuk mendukung satu tujuan.
2. Tantangan dalam mendukung pemerataan pembangunan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu

penurunan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi, serta penambahan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan kebutuhan penggunaan transportasi sedangkan peluangnya masih tersedianya pelayanan ijin trayek dan survey load factor yang bisa menjadi dasar penentuan permintaan masyarakat terhadap angkutan.

3. Tantangan untuk mendukung mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu belum memiliki jaringan trayek yang terpadu antar moda, intra moda ataupun multi moda dan semakin berkembangnya kemajuan daerah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, masih banyaknya angkutan barang yang beroperasi di jalan tanpa mengindahkan kelebihan muatan dan kelebihan dimensi kendaraan angkutnya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan urusan pelayanan di sektor perhubungan. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dan isu-isu di tingkat nasional maupun propinsi maka ada beberapa isu penting (isu strategis) bidang perhubungan yaitu :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur bidang perhubungan secara komprehensif
2. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti kendaraan operasional teknis bidang perhubungan, alat komunikasi, dll

3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan disiplin berlalu lintas mengingat saat ini kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas cenderung menurun.
4. Pengarusutamaan gender dan perencanaan responsive gender masih dipandang kecil manfaatnya sehingga belum banyak program/kegiatan yang mengakomodir kepentingan tersebut
5. Mendukung kegiatan yang bersifat ramah disabilitas khususnya dalam hal memberikan pelayanan angkutan umum / angkutan massal.
6. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas;
7. Peningkatan peran dan fungsi Terminal Tipe B dalam hal melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa angkutan yang efektif dan efisien.
8. Masih rendahnya peranan angkutan umum di dalam memperlancar mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain karena rendahnya standar pelayanan angkutan umum dan semakin maraknya angkutan online;
9. Peningkatan tindakan terhadap pengurangan emisi gas buang yang ditimbulkan dari asap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya.
10. Belum berkembangnya penyediaan sistem angkutan umum massal yang terpadu dan berkelanjutan, baik yang berbasis jalan maupun non jalan;

11. Tingkat keselamatan lalu lintas jalan yang belum optimal;
12. Tingkat keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum optimal;
13. Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas terkait dengan pengaturan, pengawasan dan pengendalian permasalahan di ruas jalan provinsi.
14. Perlunya peningkatan pengendalian dan penataan sistem transportasi

Dari isu strategis tersebut di atas maka diperlukan strategi pembangunan sektor perhubungan dimana strategi tersebut merupakan rumusan dasar atau cara-cara yang perlu ditetapkan dengan memperhatikan lingkungan strategik seperti kemampuan anggaran, potensi pengembangan sektor perhubungan, sumber daya aparatur dan dukungan stakeholders, maka dapat diketahui langkah strategi dan kebijakan yang akan di ambil untuk pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang dilakukan Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
12. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

13. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
14. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
15. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perhubungan Provinsi berdasarkan RKPD.

RKPD tahun 2024 berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Dinas Perhubungan tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut

untuk mengakomodir kebutuhan yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
					23,428,282,217					24.900.034.434		
2	15	1	1		823,564,300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		777.133.700		
2	15	1	1	1	344,918,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	380.002.500	
2	15	1	1	1	43,391,900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	17.628.500	
2	15	1	1	1	43,391,900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	16.318.900	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan											
							Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
2	1	1	1	1	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	42,641,900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	14.908.700
2	1	1	1	1	5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	42,641,900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	14.448.300
2	1	1	1	1	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	laporan	72,171,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	laporan	51.126.900
2	1	1	1	1	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	234,405,900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	282.699.900
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					113,730,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					191.905.000
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	113,730,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	191.905.000
2	1	1	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan				10,873,335,820	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan				12.239.070.900
2	1	1	1	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	orang/bulan	10,614,204,020	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	orang/bulan	12.000.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)					
2	15	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	211,130,900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	186.285.000
2	15	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	48,000,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	52.785.900
2	15	1	1	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan			186,720,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan			415.353.000
2	15	1	1	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 orang	36,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 orang	69.000.000
2	15	1	1	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	150,720,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	346.353.000
2	15	1	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan			3,315,968,899	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan			4.274.830.150
2	15	1	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	49,989,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	49.989.500
2	15	1	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,009,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	93.568.000
2	15	1	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	2,272,300,999	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	2.409.927.850

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan										
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)							
2	15	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	100,328,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	103.826.800
2	15	1	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	dokumen	50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	dokumen	49.995.000
2	15	1	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	795,437,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	1.498.619.000
2	15	1	1	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	42,904,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	68.904.000
2	15	1	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					245.552.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					706.826.400
2	15	1	1	7	5	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket	122,776,200	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket	139.926.400
2	15	1	1	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	122,776,200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	566.900.000
2	15	1	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan				3,522,377,798	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan				3.697.825.284
2	15	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	laporan	893,495,598	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	laporan	1.075.897.284

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan											
							Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
2	1	1	1	8	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	laporan	2,628,882,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	laporan	2.621.928.000
2	1	1	1	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan				2,747,033,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan				2.597.090.000
2	1	1	1	9	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	unit	3,231,810,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	unit	1.155.706.000
2	1	1	1	9	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	1,156,156,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	1.441.384.000
2	1	2					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					42,826,512,200	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan				65.168.566.355
2	1	2	1	1			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					1,161,201,100	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					1.057.005.600
2	1	2	1	1	2		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	dokumen	1,161,201,100	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	dokumen	1.057.005.600
2	1	2	1	2			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Presentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi			31,461,166,200	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Presentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi			35.164.997.400

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan											
							Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
	1	5	2	1	2	2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1268	unit	28,946,398,100	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1268	unit	30.516.693.400
	1	5	2	1	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	490	unit	2,514,768,100	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan		Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	490	unit	4.648.304.000
2	1	5	2	1	5		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Prosentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa			2.417.249.500	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Prosentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa			1.393.844.800
2	1	5	2	1	5	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	6	laporan	383,667,400	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	6	laporan	161.883.000
2	1	5	2	1	5	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	laporan	399,916,100	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	laporan	146.187.200
2	1	5	2	1	5	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12	laporan	1,383,720,200	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12	laporan	1.000.299.500
2	1	5	2	1	5	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	laporan	249,945,800	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	laporan	85.475.100
2	1	5	2	1	6		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Presentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan			799,090,100	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Presentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan			174.889.900

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan											
							Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
2	1	2	1	6	3		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	laporan	699,623,300	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	laporan	146.055.700
2	1	2	1	6	4		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	10	laporan	99,466,800	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	10	laporan	28.834.200
2	1	2	1	7			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan	Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan			626,682,400	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan	Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan			172.563.800
2	1	2	1	7	2		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	13	laporan	370,625,800	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	13	laporan	88.242.800
2	1	2	1	7	5		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4	laporan	256,056,600	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4	laporan	84.321.000
2	1	2	1	8			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Prosentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia			499,079,400	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Prosentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia			25.806.308.455
2	1	2	1	8	2		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	4	Laporan	35.300.800	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	420	Laporan	35.300.800

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan										
							Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
									Provinsi					Provinsi			
2	15	2	1	8	3		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11 unit	499,079,400	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35 unit	25.771.007.655	
2	15	2	1	9			Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Presentase Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan		861,354,500	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Presentase Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan		661.998.600	
2	15	2	1	9	1		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	861,354,500	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	661.998.600	
2	15	2	1	10			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan			258,016,600	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan			98.839.600	

No							Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
							Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
2	1	2	1	1	0	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	13	dokumen	258,016,600	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	13	dokumen	98.839.600
2	1	2	1	1	2		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan				70,677,500	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan				177.031.000
2	1	2	1	1	2	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	2	dokumen	70,677,500	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	2	dokumen	177.031.000
2	1	2	1	1	3		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan				481,860,200	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan				210.922.200

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan									
							Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	1	2	1	1	3	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	50 unit	167,358,100	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	50 unit	48.580.100
2	1	2	1	1	3	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 laporan	314,502,100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 laporan	162.342.100
2	1	2	1	1	4		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan			143,353,900	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan			117.098.900
2	1	2	1	1	4	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	4 laporan	143,353,900	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	4 laporan	117.098.900

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan											
							Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
2	1	2	1	1	5		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Dalam Provinsi		439,316,100	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Dalam Provinsi		133.066.100		
2	1	2	1	1	5	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	dokumen	92,254,000	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	dokumen	32.542.000
2	1	2	1	1	5	3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	laporan	273,608,100	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	laporan	100.524.100
2	1	3					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan				3,797,950,900	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan			3.069.848.400	
2	1	3	1	2			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat	2	Unit	53,689,800	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat	2	Unit	53,689,800

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan									
							Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Perizinan			Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional				
2	15	3	1	2	1		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	2 Unit	53.689.800	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	2 Unit	53.689.800
2	15	3	1	5			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Persentase data Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan antar Kota/Kab dalam Provinsi yang beroperasi		150,899,200	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Persentase data Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan antar Kota/Kab dalam Provinsi yang beroperasi		93.265.900
2	15	3	1	5	3		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5 dokumen	150,899,200	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5 dokumen	93.265.900

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan										
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)							
2	15	3	1	6		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dinas Perhubungan	Persentase Badan Usaha Jasa Terkait Angkutan Perairan yang dilayani		249,983,500	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dinas Perhubungan	Persentase Badan Usaha Jasa Terkait Angkutan Perairan yang dilayani		143.426.500		
2	15	3	1	6	1	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti kemas Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyarata Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15	dokumen	249,983,500	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti kemas Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyarata Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15	dokumen	143.426.500
2	15	3	1	10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Dinas Perhubungan	Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar		3,397,068,200	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Dinas Perhubungan	Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar		2.779.466.200		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
2	153103												
2	153103	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9 unit	2,999,310,600	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	9 unit	2.474.479.400			
2	153108	Dinas Perhubungan	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 laporan	397,757,600	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 laporan	304.986.800			
2	155	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		500,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dinas Perhubungan			500,000,000			
2	15513	Dinas Perhubungan	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		500.000.000	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Persentase Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan		500.000.000			

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan										
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)						
2	1 5	5	1	3	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	1	Dokumen	500.000.000	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	1	Dokumen	500.000.000
TOTAL PAGU ANGGARAN						71,693,678,317	TOTAL PAGU ANGGARAN						93.638.449.189				

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Provinsi dan kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Rapat koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kab/Kota/Provinsi.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; dan
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam bentuk seperti di bawah ini :

Tabel T-C.32.
Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Provinsi Kalimantan Selatan

- Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	orang/bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	83	orang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	orang
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13	orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	laporan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	Dokumen
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Presentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1268	unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	490	unit
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Presentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa		
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	13	laporan
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	1	unit
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	10	Dokumen
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4	laporan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	laporan
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		Presentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	laporan
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	10	laporan
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan		
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	13	laporan
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4	laporan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Prosentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	unit
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	dokumen

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	13	dokumen
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	2	dokumen
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	50	unit
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4	laporan
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	4	laporan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Provinsi				
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Dalam Provinsi		
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	dokumen
	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	dokumen
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	laporan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Persentase data Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan antar Kota/Kab dalam Provinsi yang beroperasi		
	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5	dokumen

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dinas Perhubungan	Persentase Badan Usaha Jasa Terkait Angkutan Perairan yang dilayani		
	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralataan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti kemas Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyarata Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik	15	dokumen
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar		
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	9	unit
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	laporan

- UPTD TERMINAL TIPE B

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Tenaga Keuangan yang diberikan honor selama satu tahun	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	2 Paket
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Komponen instalasi listrik bangunan kantor	1 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah ATK selama satu Tahun	2 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapatkan BBM	1 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Cetak dan Penggandaan selama satu tahun	2 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Bahan Bacaan selama satu tahun	1 Dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi Selama satu tahun	60 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	5 Unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Bangunan Kantor yang Terbayarkan Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	8 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	38 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen
	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	1 Unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3 Unit
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM	6 Orang

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Kebijakan nasional terkait urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional	Sumber
A	Keselamatan dan Keamanan	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi	
	2. Sasaran menurunnya Jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	
B	Pelayanan Transportasi	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana	

	transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	2. Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam Jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi sdm transportasi dalam Jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan	
	3. Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penelitian transportasi	
	4. Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance, dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja	
	5. Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dengan arah kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	

	6. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance, dengan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah	
C	Kapasitas Transportasi	
	1. Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda,	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	2. Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia	
	3. Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan	

	umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih modal terpadu	
	4. Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024

Kebijakan nasional tersebut perlu ditelaah untuk menentukan kebijakan bidang perhubungan di level pemerintah Provinsi. Telaah tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan Kebijakan bidang perhubungan antara pusat dengan daerah sehingga berjalan selaras, efektif, dan efisien. Kementerian Perhubungan menetapkan lima program prioritas yakni pembangunan konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah terpencil, perbatasan, Ibu Kota Negara Baru serta pengembangan SDM. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi (rancangan awal). Kelima program Nasional/Provinsi tersebut telah diakomodir ke dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Sistem transportasi yang handal, aman nyaman dan selamat, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang handal (memiliki kemampuan pelayanan aksesibilitas yang tinggi dan tepat waktu), aman (*security*), nyaman (*comfortable*), selamat (*safety*), dan mampu mengembangkan informasi dan teknologi yang dapat diterima oleh masyarakat secara positif. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan

pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan adalah **“Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan dengan penyediaan infratraktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan”**

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN
1	Terwujudnya Konektivitas Provinsi
2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan
3	Meningkatkan keselamatan Transportasi
4	Meninfgkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 dan diperkirakan maju tahun 2024

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian Visi dan misi kepala daerah
- b. Pencapaian NSPK dan SPM perhubungan

Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2024, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2024 sebagai berikut :

a. Dinas Perhubungan

Jumlah Program	=	4 Program
Jumlah Kegiatan	=	25 kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	=	53 Sub Kegiatan

b. UPTD Terminal Tipe B

Jumlah Program	=	2 Program
Jumlah Kegiatan	=	7 kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan = 21 Sub Kegiatan

- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang di rinci Dinas Perhubungan sejumlah Rp 93.638.449.189 dan UPTD Terminal Tipe B Sejumlah Rp 8.142.862.800

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Selatan

- Dinas Perhubungan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				To lok Ukur	Target	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
2	15	1	1	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					777.133.700							
2	15	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dinas Perhubungan	4	Dokumen		380.002.500	APBD			344,918,900		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
2	15	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dinas Perhubungan	1	Dokumen		17.628.500	APBD			43,391,900
2	15	1	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dinas Perhubungan	1	Dokumen		16.318.900	APBD			43,391,900
2	15	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dinas Perhubungan	1	Dokumen		14.908.700	APBD			42,641,900
2	15	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dinas Perhubungan	1	Dokumen		14.448.300	APBD			42,641,900
2	15	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dinas Perhubungan	2	laporan		51.126.900	APBD			72,171,900
2	15	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dinas Perhubungan	4	laporan		282.699.900	APBD			234,405,900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
2	1	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
2	15	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	83	orang/bulan		12.000.000.000	APBD		12.000.000.000
2	15	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	12	dokumen		186.285.000	APBD		211,130,900
2	15	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	1	laporan		52.785.900	APBD		52.785.900
2	15	1	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								APBD			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	1	laporan		191.905.000	APBD		113,730,000
2	1	1	1	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
2	15	1	1	5		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Perhubungan	83	orang		69.000.000	APBD		36,000,000
2	15	1	1	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Dinas Perhubungan	10	orang		346.353.000	APBD		150,720,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
								Pendidikan dan Pelatihan										
2	1	1	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
2	15	1	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	1	paket	49.989.500	APBD				49,989,500
2	15	1	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	1	paket	93.568.000	APBD				5,009,400
2	15	1	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	1	paket	2.409.927.850	APBD				2,272,300,999
2	15	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perhubungan	1	paket	103.826.800	APBD				100,328,000
2	15	1	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinas Perhubungan	1	dokumen	49.995.000	APBD				50,000,000
2	15	1	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	20	laporan	1.498.619.000	APBD				795,437,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
2	15	1	1	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dinas Perhubungan	1	Dokumen		68.904.000	APBD			42,904,000
2	15	1	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
2	15	1	1	7	5	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Dinas Perhubungan	1	paket		139.926.400	APBD			122,776,200
2	15	1	1	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Dinas Perhubungan	15	unit		566.900.000	APBD			122,776,200
2	15	1	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Dinas Perhubungan					APBD			
2	15	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Dinas Perhubungan	2	laporan		1.075.897.284	APBD			893,495,598
2	15	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Dinas Perhubungan	2	laporan		2.621.928.000	APBD			2,628,882,200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
2	1	1	1	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Dinas Perhubungan							
2	15	1	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perhubungan	34	unit	1.155.706.000	APBD			3,231,810,000
2	15	1	1	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perhubungan	2	unit	1.441.384.000	APBD			1,156,156,000
2	15	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							65.168.566.355				
2	15	2	1	1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			Presentas e Rencana Induk Jaringan LLAJ yang di tetapkan								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
2	15	2	1	1	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Dinas Perhubungan	1	dokumen	Dokumen Tatrawil	1.057.005.600	APBD			1,161,201,100	
2	15	2	1	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Presentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi												
2	15	2	1	2	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia		Dinas Perhubungan	1268	unit		30.516.693.400	APBD			28,946,398,100	
2	15	2	1	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		Dinas Perhubungan	490	unit		4.648.304.000	APBD			2,514,768,100	
2	15	2	1	5		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Presentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa												

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
2	15	2	1	5	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Dinas Perhubungan	13	laporan	161.883.000	APBD		383,667,400
2	15	2	1	5	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Dinas Perhubungan	10	dokumen	146.187.200	APBD		399,916,100
2	15	2	1	5	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		Dinas Perhubungan	12	laporan	1.000.299.500	APBD		1,383,720,200
2	15	2	1	5	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		Dinas Perhubungan	4	laporan	85.475.100	APBD		249,945,800
2	15	2	1	6		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		Presentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan									

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	
2	15	2	1	6	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		Dinas Perhubungan	6	laporan		146.055.700	APBD			699,623,300
2	15	2	1	6	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		Dinas Perhubungan	10	laporan		28.834.200	APBD			99,466,800
2	15	2	1	7		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan											
2	15	2	1	7	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Dinas Perhubungan	13	laporan		88.242.800	APBD			370,625,800

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
2	15	2	1	7	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Dinas Perhubungan	4	laporan	84.321.000			256,056,600
2	15	2	1	8		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Prosentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia						APBD			
2	15	2	1	8	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		Dinas Perhubungan	420	Laporan	35.300.800	APBD		35.300.800

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
2	15	2	1	8	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Dinas Perhubungan	35	unit	25.771.007.655	APBD			25.771.007.655
2	15	2	1	9		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
2	15	2	1	9	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		Dinas Perhubungan	1	dokumen	661,998,600				661,998,600
2	15	2	1	10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Presentas e Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang										

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
							Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan											
2	15	2	1	10	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi		Dinas Perhubungan	13	dokumen	98.839.600	APBD			258,016,600
2	15	2	1	12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah										

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
						dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan										
2	15	2	1	12	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi		Dinas Perhubungan	2	dokumen	177.031.000	APBD			70,677,500
2	15	2	1	13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Presentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/					
			Provinsi														
2	15	2	1	13	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Dinas Perhubungan	50	unit	48.580.100	APBD			167,358,100
2	15	2	1	13	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	4	laporan	162.342.100	APBD			314,502,100
2	15	2	1	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
						dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
2	15	2	1	14	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi		Dinas Perhubungan	4	laporan	117.098.900	APBD			143,353,900	
2	15	2	1	15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Dalam Provinsi yang diterbitkan											

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
2	15	2	1	15	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Dinas Perhubungan	1	dokumen	32.542.000	APBD			92,254,000
2	15	2	1	15	3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Dinas Perhubungan	4	laporan	100.524.100	APBD			273,608,100
2	15	3				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								3,069,848,400				
2	15	3	1	2		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar					Dinas Perhubungan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
	Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional														
2	15	3	1	2	5	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Dinas Perhubungan	2	Unit	53.689.800	APBD			53.689.800
2	15	3	1	5		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase data Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan antar Kota/Kab dalam Provinsi yang beroperasi	Dinas Perhubungan							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
2	15	3	1	5	3	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Dinas Perhubungan	5	dokumen	93.265.900	APBD			150,899,200
2	15	3	1	6		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Persentase Badan Usaha Jasa Terkait Angkutan Perairan yang dilayani										
2	15	3	1	6	1	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, jasa Pengurusan			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan		Dinas Perhubungan	15	dokumen	143.426.500	APBD			249,983,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
	Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralataan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti kemas Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik			Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik										
2	15	3	1	10	3	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar							
2	15	3	1	10	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Dinas Perhubungan	9	unit	2.474.479.400	APBD		2,999,310,600

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
2	15	3	1	10	3	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Dinas Perhubungan	4	Laporan	304.986.800	APBD			304.986.800
2	15	5				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								500,000,000				
2	15	5	1	3		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Capaian Prog	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
2	15	5	1	3	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan		Dinas Perhubungan	3	Dokumen	500,000,000	APBD			500,000,000
TOTAL ANGGARAN											93.638.449.189				71,693,678,317			

- UPTD Terminal tipe B

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
2	15				PERHUBUNGAN			PERHUBUNGAN								
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		PERSENT ASE PEMENUHAN PENGURUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Keuangan yang diberikan honor selama satu tahun	1 Laporan	73.575.000	APBD				102,137,250
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	3.195.000	APBD				3,674,250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.195.000	APBD			3,674,250	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	3 Paket	57.000.000	APBD			112,930,000	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik bangunan kantor	1 Paket	52.098.800	APBD			91,661,325	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK selama satu Tahun	2 Paket	55.927.300	APBD			73,653,475	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan selama satu tahun	2 Paket	34.999.000	APBD			45,308,850	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan selama satu tahun	1 Dokumen	4.800,000	APBD			5,520,000	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi Selama satu tahun	60 Laporan	379.379.000	APBD			491,416,850	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	5 Unit	44.500.000	APBD			159,850,000	
2	15	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3 Unit	139.000.000	APBD			187,450,000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bangunan Kantor yang Terbayarkan Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Laporan	162.000.000	APBD			207,000,000	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	706.540.900	APBD			812,544,920	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	8 Unit	91.560.000	APBD			105,294,000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	38 Unit	18.960.000	APBD			39,905,000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	1 Unit	199.920.000	APBD			115,000,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B								
2	15	02	1.03	06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B			Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	5 Unit	1.205.266.000	APBD			-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2	15	02	1.03	01 1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3 Unit	464.084.000	APBD			2,000,000,000	
TOTAL ANGGARAN																8,737,750,170

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan. Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan pada tahun 2024 akan disampaikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

No						Rancangan Akhir RKPD					
	Program / Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)		(6)	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				25,069,215,217	
2	15	1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		777.133.700	
2	15	1	1	1	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	380.002.500
2	15	1	1	1	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	17.628.500
2	15	1	1	1	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	16.318.900
2	15	1	1	1	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	14.908.700
2	15	1	1	1	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	14.448.300
2	15	1	1	1	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	laporan	51.126.900
2	15	1	1	1	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	282.699.900

No						Rancangan Akhir RKPD					
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					258.001.000
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	191.905.000
2	15	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan				12.219.360.900
2	15	1	1	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	orang/bulan	12.000.000.000
2	15	1	1	2	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	186.285.000
2	15	1	1	2	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	52.785.900
2	15	1	1	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan				219.720.000
2	15	1	1	5	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60	orang	69.000.000
2	15	1	1	5	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	orang	346.353.000
2	15	1	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan				4.274.830.150

No						Rancangan Akhir RKPD					
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
2	15	1	1	6	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	49.989.500
2	15	1	1	6	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	93.568.000
2	15	1	1	6	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	2.409.927.850
2	15	1	1	6	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	103.826.800
2	15	1	1	6	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	dokumen	49.995.000
2	15	1	1	6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	1.498.619.000
2	15	1	1	6	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	68.904.000
2	15	1	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					706.826.400
2	15	1	1	7	0005	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket	139.926.400
2	15	1	1	7	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	566.900.000

No						Rancangan Akhir RKPD				
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2	15	1	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan			3.697.825.284
2	15	1	1	8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	1.075.897.284
2	15	1	1	8	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2.621.928.000
2	15	1	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan			2.597.090.000
2	15	1	1	9	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	1.155.706.000
2	15	1	1	9	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1.441.384.000
2	15	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				64.111.560.755
2	15	2	1	1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1.057.088.000
2	15	2	1	1	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 dokumen	1.057.088.000
2	15	2	1	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Presentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi		35.164.997.400

No						Rancangan Akhir RKPD					
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
	15	2	1	2	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1268	unit	30.516.693.400
	15	2	1	2	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	490	unit	4.648.304.000
2	15	2	1	5		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Prosentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa			1.393.844.800
2	15	2	1	5	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	6	laporan	161.883.000
2	15	2	1	5	0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	laporan	146.187.200
2	15	2	1	5	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		laporan	1.000.299.500
2	15	2	1	5	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	laporan	85.475.100
2	15	2	1	6		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Presentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan			174.889.900
2	15	2	1	6	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	laporan	146.055.700

No						Rancangan Akhir RKPD					
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
2	15	2	1	6	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	10	laporan	28.858.000
2	15	2	1	7		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan	Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan			172.563.800
2	15	2	1	7	0002	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	13	laporan	88.242.800
2	15	2	1	7	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4	laporan	84.321.000
2	15	2	1	8		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Prosentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia			25.806.308.455
2	15	2	1	8	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	Laporan	35.301.900
2	15	2	1	8	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	35	Unit	25.771.007.655

No						Rancangan Akhir RKPD					
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
2	15	2	1	9		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Presentase Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan			661.998.600
2	15	2	1	9	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi		jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	dokumen	661.998.600
2	15	2	1	10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan				98.839.600
2	15	2	1	10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	13	dokumen	98.839.600
2	15	2	1	12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan				177.034.500

No						Rancangan Akhir RKPD					
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
2	15	2	1	12	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	2	dokumen	177.034.500
2	15	2	1	13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan				210.922.200
2	15	2	1	13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	50	unit	48.580.100
2	15	2	1	13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4	laporan	162.342.100
2	15	2	1	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan				117.100.900
2	15	2	1	14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	4	laporan	117.100.900

No						Rancangan Akhir RKPD					
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
2	15	2	1	15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Dalam Provinsi			133.066.100
2	15	2	1	15	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	dokumen	32.542.000
2	15	2	1	15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	laporan	100.524.100
2	15	3				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan				3.069.848.400
2	15	3	1	2		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dinas Perhubungan	Persentase Badan Usaha Jasa Terkait Angkutan Perairan yang dilayani			53.689.800

No						Rancangan Akhir RKPD					
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
2	15	3	1	2	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perhubungan	Persentase Rekomendasi perbitan izin usaha angkutan laut dalam daerah provinsi kalimantan selatan Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	2	Unit	53.689.800
2	15	3	1	5		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Presentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan			93.265.900
2	15	3	1	5	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5	dokumen	93.265.900

No						Rancangan Akhir RKPD					
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
2	15	3	1	6		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dinas Perhubungan	Presentase rekomendasi Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang di terbitkan			143.426.500
2	15	3	1	6	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyarata Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15	Dokumen	143.426.500
2	15	3	1	10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar			2.779.466.200
2	15	3	1	10	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	9	unit	2.474.479.400

No						Rancangan Akhir RKPD					
						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
2	15	3	1	10	0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	laporan	304.986.800
2	15	5				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dinas Perhubungan				500.000.000
2	15	5	1	03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Persentase Jaringan Perkeretaapian provinsi yang di tetapkan			500.000.000
2	15	5	1	03	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	3	Dokumen	500.000.000
TOTAL PAGU ANGGARAN											93.638.449.189

- UPTD TERMINAL TIPE B

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rancangan Awal Tahun 2024				
						Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
2	15				PERHUBUNGAN	PERHUBUNGAN				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			79.965.000	
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Keuangan yang diberikan honor selama satu tahun	1 Laporan	73.575.000	APBD
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	3,195,000	APBD
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3,195,000	APBD
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			57.000.000	

2	15	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	3 Paket	57.000.000	APBD
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah			527.835.100	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik bangunan kantor	1 Paket	52.729.300	APBD
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK selama satu Tahun	2 Paket	55.927.800	APBD
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan selama satu tahun	2 Paket	34.999.000	APBD
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan selama satu tahun	1 Dokumen	4,800,000	APBD
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi Selama satu tahun	60 Laporan	379.379.000	APBD
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			183.500.000	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	5 Unit	44.500.000	APBD
2	15	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3 Unit	139.000.000	APBD
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			868.540.900	

2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bangunan Kantor yang Terbayarkan Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Laporan	162.000.000	APBD
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	706,560,800	APBD
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250.160.000	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	8 Unit	91,560,000	APBD
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	38 Unit	18.960.000	APBD
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	199.920.000	APBD
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				

2	15	02	1.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit	1.205.266.000	APBD
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3 Unit	464.084.000	APBD
TOTAL ANGGARAN									3.696.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.